



ANDREI ANGOUW
WALIKOTA MANADO

dr. RICHARD SUALANG
WAKIL WALIKOTA MANADO

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2026**

**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MANADO**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hikmat serta karunia-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado Tahun 2026 boleh tersusun.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program kegiatan dan Anggaran yang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2026.

Harapan kami Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Manado khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Manado, 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA MANADO



JIMMY C.E. ROTINSULU, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19731218 200012 1 001

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II - HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN 2023	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP	13
2.4. Review Tentang Rancangan Awal RKPD	14
BAB III - TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP	19
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	20
BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP	21
4.1. Program dan Kegiatan	21
BAB V – PENUTUP	25

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja (Renja) merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran serta Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kota Manado yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2021 – 2026 yang membawa visi :

MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI BERANDA SULAWESI UTARA DAN INDONESIA KE ASIA PASIFIK

Adapun Misi untuk dapat mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

MISI 2 : PENGUATAN EKONOMI KOTA YANG BERTUMPU PADA INDUSTRI JASA, PERDAGANGAN, DAN PARIWISATA

Terkait dengan Misi ini maka DPMPTSP mengemban tugas untuk Membantu Walikota dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado melalui Peningkatan Investasi. Oleh karena itu DPMPTSP perlu untuk membuat Perencanaan Pengembangan Iklim Investasi yang bertumpu pada Sektor Industri Jasa, Perdagangan dan Pariwisata. Selain hal tersebut agar arah kebijakan Investasi dapat selaras dengan Misi yang telah ditetapkan maka perlu adanya penajaman arah Investasi dengan memberikan Insentif Penanaman Modal pada sektor-sektor yang menjadi tumpuan pada Misi ini namun tidak juga meninggalkan Pelayanan untuk kemudahan Investasi di sektor-sektor potensial lainnya.

Berdasarkan Latar Belakang itulah maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado Menyusun Rancangan Rencana Kinerja untuk Tahun Anggaran 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado ini dilandaskan pada :

1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 822).
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Berita Negara RI No.4287).
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI No. 4421).
4. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/2021/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai Dokumen Awal Perencanaan Kinerja Tahun 2026 yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Rancangan Rencana Kerja ini bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan menjadi landasan dalam Penyusunan Anggaran tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

2.4. Review Tentang Rancangan Awal DPMPTSP

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun 2026 Rencana Kerja yang dibuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado adalah rencana dari pelaksanaan Renstra perangkat daerah sebagaimana terlampir pada lampiran tabel 1.

2.1.1 Program

Program-program dalam Rancangan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2024 untuk pencapaian sasaran yang telah ada yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
4. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
5. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

2.1.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari program-program untuk mencapai sasaran perangkat daerah tersebut di atas, maka dijabarkan pula dalam suatu rencana kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri atas:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
7. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
8. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
9. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 3. Pengawasan Penanaman Modal

- **Indikator Kegiatan**

Hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado
Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

KOTA MANADO
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)

SKPD : 2.18.0.00.0.00.19.0000. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengguna Anggaran : JIMMY CHARLES ESAU ROTINSULU, SE, M.Si
Bendahara Pengeluaran : RIKA PITALAU
Tahun Anggaran : 2024
Bulan : Desember

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.18.2.18.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.105.755.044,00	-	-	-	7.345.244.334,00	597.194.687,00	7.942.439.021,00	-	-	-	7.942.439.021,00	163.316.023,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.975.675.044,00	-	-	-	7.236.844.334,00	586.354.687,00	7.823.199.021,00	-	-	-	7.823.199.021,00	152.476.023,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.539.402.513,00	-	-	-	3.288.123.613,00	250.077.700,00	3.538.201.313,00	-	-	-	3.538.201.313,00	1.201.200,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.700.800,00	-	-	-	83.293.600,00	6.407.200,00	89.700.800,00	-	-	-	89.700.800,00	-
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	355.716.582,00	-	-	-	330.216.926,00	25.294.350,00	355.511.276,00	-	-	-	355.511.276,00	205.306,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.382.048,00	-	-	-	4.997.616,00	384.432,00	5.382.048,00	-	-	-	5.382.048,00	-
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	241.930.000,00	-	-	-	226.385.000,00	15.545.000,00	241.930.000,00	-	-	-	241.930.000,00	-
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	106.580.000,00	-	-	-	95.560.000,00	10.660.000,00	106.220.000,00	-	-	-	106.220.000,00	360.000,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11.200.000,00	-	-	-	9.040.000,00	2.160.000,00	11.200.000,00	-	-	-	11.200.000,00	-
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	86.625.000,00	-	-	-	80.170.000,00	5.915.000,00	86.085.000,00	-	-	-	86.085.000,00	540.000,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	176.197.860,00	-	-	-	163.307.100,00	12.311.400,00	175.618.500,00	-	-	-	175.618.500,00	579.360,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.055.520,00	-	-	-	3.765.840,00	289.680,00	4.055.520,00	-	-	-	4.055.520,00	-

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado
Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

Halaman : 2

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20628.513,00	-	-	-	6.013.226,00	14.538.324,00	20.551.550,00	-	-	-	20.551.550,00	76.963,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.937,00	-	-	-	42.868,00	3.233,00	46.101,00	-	-	-	46.101,00	3.836,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.760,00	-	-	-	1.628,00	132,00	1.760,00	-	-	-	1.760,00	4.000,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.236.795.734,00	-	-	-	1.117.574.474,00	71.791.510,00	1.189.365.984,00	-	-	-	1.189.365.984,00	47.429.750,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	93.449.494,00	-	-	-	82.536.889,00	7.233.684,00	89.770.573,00	-	-	-	89.770.573,00	3.678.921,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0001.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.007.955.283,00	-	-	-	1.745.815.554,00	163.743.042,00	1.909.558.596,00	-	-	-	1.909.558.596,00	98.396.687,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.080.000,00	-	-	-	108.400.000,00	10.840.000,00	119.240.000,00	-	-	-	119.240.000,00	10.840.000,00
2.18.2.18.0.001.2.02.0003.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	130.080.000,00	-	-	-	108.400.000,00	10.840.000,00	119.240.000,00	-	-	-	119.240.000,00	10.840.000,00
2.18.2.18.0.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.880.000,00	-	-	-	17.400.000,00	2.080.000,00	19.480.000,00	-	-	-	19.480.000,00	1.400.000,00
2.18.2.18.0.001.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.880.000,00	-	-	-	17.400.000,00	2.080.000,00	19.480.000,00	-	-	-	19.480.000,00	1.400.000,00
2.18.2.18.0.001.2.03.0006.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.400.000,00	-	-	-	7.000.000,00	700.000,00	7.700.000,00	-	-	-	7.700.000,00	700.000,00
2.18.2.18.0.001.2.03.0006.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	-	-	-	3.400.000,00	680.000,00	4.080.000,00	-	-	-	4.080.000,00	-
2.18.2.18.0.001.2.03.0006.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	-	-	-	7.000.000,00	700.000,00	7.700.000,00	-	-	-	7.700.000,00	700.000,00
2.18.2.18.0.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado
Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

Halaman : 3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.18.2.18.0.001.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.001.2.05.0009.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.467.000,00	-	-	-	289.263.882,00	4.940.000,00	294.203.882,00	-	15.050.000,00	15.050.000,00	309.253.882,00	2.213.118,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.611.000,00	-	-	-	152.912.000,00	4.940.000,00	157.852.000,00	-	5.050.000,00	5.050.000,00	162.902.000,00	709.000,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0002.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.097.000,00	-	-	-	35.806.500,00	-	35.806.500,00	-	-	-	35.806.500,00	290.500,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0002.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.670.000,00	-	-	-	28.607.500,00	-	28.607.500,00	-	-	-	28.607.500,00	62.500,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0002.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	-	-	-	-	4.940.000,00	4.940.000,00	-	5.050.000,00	5.050.000,00	9.990.000,00	10.000,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0002.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.880.000,00	-	-	-	11.880.000,00	-	11.880.000,00	-	-	-	11.880.000,00	-
2.18.2.18.0.001.2.06.0002.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.964.000,00	-	-	-	76.618.000,00	-	76.618.000,00	-	-	-	76.618.000,00	346.000,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.18.2.18.0.001.2.06.0006.5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.18.2.18.0.001.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.856.000,00	-	-	-	136.351.882,00	-	136.351.882,00	-	-	-	136.351.882,00	1.504.118,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0009.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.250.000,00	-	-	-	30.242.500,00	-	30.242.500,00	-	-	-	30.242.500,00	7.500,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0009.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.530.000,00	-	-	-	26.468.772,00	-	26.468.772,00	-	-	-	26.468.772,00	61.228,00
2.18.2.18.0.001.2.06.0009.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.076.000,00	-	-	-	79.640.610,00	-	79.640.610,00	-	-	-	79.640.610,00	1.435.390,00
2.18.2.18.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.271.335,00	-	-	-	429.547.000,00	40.770.000,00	470.317.000,00	-	-	-	470.317.000,00	4.954.335,00

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado
Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

Halaman : 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.18.2.18.0.001.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.471.335,00	-	-	-	191.830.000,00	18.870.000,00	210.700.000,00	-	-	-	210.700.000,00	4.771.335,00
2.18.2.18.0.001.2.08.0002.5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	215.471.335,00	-	-	-	191.830.000,00	18.870.000,00	210.700.000,00	-	-	-	210.700.000,00	4.771.335,00
2.18.2.18.0.001.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.800.000,00	-	-	-	237.717.000,00	21.900.000,00	259.617.000,00	-	-	-	259.617.000,00	183.000,00
2.18.2.18.0.001.2.08.0004.5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.000.000,00	-	-	-	29.850.000,00	3.000.000,00	32.850.000,00	-	-	-	32.850.000,00	150.000,00
2.18.2.18.0.001.2.08.0004.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	108.000.000,00	-	-	-	99.000.000,00	9.000.000,00	108.000.000,00	-	-	-	108.000.000,00	-
2.18.2.18.0.001.2.08.0004.5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	82.500.000,00	-	-	-	75.867.000,00	6.600.000,00	82.467.000,00	-	-	-	82.467.000,00	33.000,00
2.18.2.18.0.001.2.08.0004.5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.300.000,00	-	-	-	33.000.000,00	3.300.000,00	36.300.000,00	-	-	-	36.300.000,00	-
2.18.2.18.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.350.000,00	-	-	-	91.046.590,00	5.965.030,00	97.011.620,00	-	2.621.400,00	2.621.400,00	99.633.020,00	7.716.980,00
2.18.2.18.0.001.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.400.000,00	-	-	-	91.046.590,00	3.615.030,00	94.661.620,00	-	2.621.400,00	2.621.400,00	97.283.020,00	5.116.980,00
2.18.2.18.0.001.2.09.0002.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.000.000,00	-	-	-	57.724.290,00	3.615.030,00	61.339.320,00	-	-	-	61.339.320,00	3.660.680,00
2.18.2.18.0.001.2.09.0002.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.500.000,00	-	-	-	2.725.300,00	-	2.725.300,00	-	2.621.400,00	2.621.400,00	5.346.700,00	153.300,00
2.18.2.18.0.001.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.650.000,00	-	-	-	30.597.000,00	-	30.597.000,00	-	-	-	30.597.000,00	53.000,00
2.18.2.18.0.001.2.09.0002.5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00
2.18.2.18.0.001.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000,00	-	-	-	-	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00	2.600.000,00

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado
Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

Halaman : 5

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.18.2.18.0.001.2.09.0006.5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.190.000,00
2.18.2.18.0.001.2.09.0006.5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	-	-	-	-	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00	410.000,00
2.18.2.18.0.002.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.302.000,00	-	-	-	33.042.866,00	-	33.042.866,00	-	-	-	33.042.866,00	259.134,00
2.18.2.18.0.002.2.01.0001.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	33.302.000,00	-	-	-	33.042.866,00	-	33.042.866,00	-	-	-	33.042.866,00	259.134,00
2.18.2.18.0.002.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.002.2.01.0001.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.302.000,00	-	-	-	33.042.866,00	-	33.042.866,00	-	-	-	33.042.866,00	259.134,00
2.18.2.18.0.002.2.01.0001.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.0.003.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	57.678.000,00	-	-	-	55.598.420,00	-	55.598.420,00	-	-	-	55.598.420,00	2.079.580,00
2.18.2.18.0.003.2.01.0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	57.678.000,00	-	-	-	55.598.420,00	-	55.598.420,00	-	-	-	55.598.420,00	2.079.580,00
2.18.2.18.0.003.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.100.000,00	-	-	-	5.030.000,00	-	5.030.000,00	-	-	-	5.030.000,00	70.000,00
2.18.2.18.0.003.2.01.0002.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.578.000,00	-	-	-	50.568.420,00	-	50.568.420,00	-	-	-	50.568.420,00	2.009.580,00
2.18.2.18.0.004.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	355.896.000,00	-	-	-	296.566.000,00	39.000.000,00	335.566.000,00	-	-	-	335.566.000,00	20.330.000,00

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado
Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

Halaman : 6

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.18.2.18.0.004.2.01.0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	330.000.000,00	-	-	-	290.670.000,00	39.000.000,00	329.670.000,00	-	-	-	329.670.000,00	330.000,00
2.18.2.18.0.004.2.01.0006.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	258.000.000,00	-	-	-	236.670.000,00	21.000.000,00	257.670.000,00	-	-	-	257.670.000,00	330.000,00
2.18.2.18.0.004.2.01.0006.5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	72.000.000,00	-	-	-	54.000.000,00	18.000.000,00	72.000.000,00	-	-	-	72.000.000,00	-
2.18.2.18.0.004.2.01.0007.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	25.896.000,00	-	-	-	5.896.000,00	-	5.896.000,00	-	-	-	5.896.000,00	20.000.000,00
2.18.2.18.0.004.2.01.0007.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.916.000,00	-	-	-	3.916.000,00	-	3.916.000,00	-	-	-	3.916.000,00	-
2.18.2.18.0.004.2.01.0007.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.980.000,00	-	-	-	1.980.000,00	-	1.980.000,00	-	-	-	1.980.000,00	-
2.18.2.18.0.004.2.01.0007.5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	583.883.000,00	-	-	-	285.952.852,00	162.522.171,00	448.475.023,00	-	10.300.000,00	10.300.000,00	458.775.023,00	125.107.977,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60.798.000,00	-	-	-	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	-	-	4.400.000,00	56.398.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	798.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0004.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000,00	-	-	-	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	-	-	4.400.000,00	21.600.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0004.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.400.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0004.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.600.000,00

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado
Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

Halaman : 7

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.18.2.18.0.005.2.01.0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	229.385.000,00	-	-	-	129.960.000,00	79.555.000,00	209.515.000,00	-	400.000,00	400.000,00	209.915.000,00	19.470.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0005.5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.540.000,00	-	-	-	6.000.000,00	1.540.000,00	7.540.000,00	-	-	-	7.540.000,00	-
2.18.2.18.0.005.2.01.0005.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00	-
2.18.2.18.0.005.2.01.0005.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.900.000,00	-	-	-	19.500.000,00	17.800.000,00	37.300.000,00	-	-	-	37.300.000,00	1.600.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0005.5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	39.600.000,00	-	-	-	23.100.000,00	3.300.000,00	26.400.000,00	-	-	-	26.400.000,00	13.200.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0005.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	101.790.000,00	-	-	-	54.000.000,00	47.790.000,00	101.790.000,00	-	-	-	101.790.000,00	-
2.18.2.18.0.005.2.01.0005.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.850.000,00	-	-	-	8.740.000,00	-	8.740.000,00	-	-	-	8.740.000,00	110.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0005.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.305.000,00	-	-	-	18.620.000,00	7.125.000,00	25.745.000,00	-	-	-	25.745.000,00	4.560.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0006.	Pengawasan Penanaman Modal	293.700.000,00	-	-	-	151.592.852,00	82.967.171,00	234.560.023,00	-	9.900.000,00	9.900.000,00	244.460.023,00	49.239.977,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0006.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.600.000,00	-	-	-	20.672.852,00	4.187.171,00	24.860.023,00	-	-	-	24.860.023,00	739.977,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.080.000,00	-	-	-	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	4.050.000,00	30.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	9.700.000,00
2.18.2.18.0.005.2.01.0006.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	245.670.000,00	-	-	-	130.920.000,00	75.980.000,00	206.900.000,00	-	-	-	206.900.000,00	38.770.000,00

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado
Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

JUMLAH	10.051.482.379,00	0,00	-	0,00	8.843.661.944,00	852.471.888,00	9.696.133.832,00	0,00	27.971.400,00	27.971.400,00	9.724.105.232,00	327.377.147,00
Penerimaan :												
- SP2D		-	-	-	8.843.661.944,00	852.471.888,00	9.696.133.832,00	50.000.000	-	50.000.000	9.746.133.832,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. PPh-21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	129.750	129.750	129.750	-
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. PPh-Final		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan :		-	-	-	8.843.661.944,00	852.471.888,00	9.696.133.832,00	50.000.000	129.750	50.129.750	9.746.263.582,00	
Pengeluaran :												
- SPJ(LS+UP/GU/TU)		-	-	-	8.843.661.944,00	852.471.888,00	9.696.133.832,00	-	27.971.400	27.971.400	9.724.105.232,00	
- Penyetoran Pajak												
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. PPh-21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	129.750	129.750	129.750	-
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. PPh-Final		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	22.028.600	22.028.600	22.028.600	-
Jumlah Pengeluaran :		-	-	-	8.843.661.944,00	852.471.888,00	9.696.133.832,00	-	50.129.750	50.129.750	9.746.263.582,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	50.000.000	(50.000.000)	-	-	-

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

JIMMY CHARLES ESAU ROTINSULU, SE, M.Si
NIP. 19731218 200012 1 001

MANADO, 01 Januari 2025
Bendahara Pengeluaran

RIKA PITALAU
NIP.19860727 200902 2 005

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah serta target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sesuai yang tertuang dalam RENSTRA-DPMPTSP tahun 2021 - 2026. Realisasi capaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Manado tahun 2024 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2

TABEL 2.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2024		PROYEKSI INDIKATOR KINERJA	
		TARGE KINERJA	REALISASI	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (79)		A (80)	A (83)
	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%	0%
	Persentase ASN Dinas Penanaman Modal & PTSP yang berkinerja Baik	100%	98%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu Honor Penatausahaan Keuangan dan Pengelola Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Barang dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Waktu Honor Penatausahaan dan Pengelola Barang dan Aset	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Penunjang Kegiatan Kantor	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Jasa Penunjang Kegiatan	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Jasa Penunjang Kegiatan	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Komitmen Penanaman Modal Non UMK (Rp Miliar)	1,672.90	2,123.028	1,923.80	2,212.30
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi yang siap dipromosikan (Investmen Project Ready to Offer /IPRO)	2		1	2
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perda	1		0	1
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal /MOU	2 MOU	3 MOU	2 MOU	2 MOU
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investasi	4		5	6
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event pameran yang diikuti (lokal, regional, nasional dan internasional)	5	2	6	6
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM pelayanan perizinan penanaman modal	3.3	3.49	3.4	3.5
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Izin yang diproses Sesuai Standar	95%	90%	95%	98%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Uptime Server Sistem Perizinan Online (SIP2T)	95%	90%	98%	98%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kanal / Pengaduan	6	6	6	6
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	98%	96%	98%	99%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)	9	6	10	11
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	250	6	10	15
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko	200	377	250	350
Pengawasan Penanaman Modal	Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	250	756	295	350

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Berikut Isu-isu Strategis yang memiliki Sinergi terhadap Tugas dan Fungsi DPMPTSP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya daya saing investasi Kota Manado	Belum Optimalnya Peningkatan Realisasi Investasi di Kota Manado	Banyaknya Investor yang terhambat karena terhalang Tata Ruang Wilayah Kota Manado
			Belum memiliki dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang komprehensif serta Peta Potensi Investasi yang akurat
			Menurunnya Minat Investasi karena terjadinya penurunan tingkat Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional
		Belum Optipmalnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Belum adanya Fasilitas Daerah untuk Investasi yang bisa ditawarkan sebagai salah satu daya saing daerah dalam menarik Investor dari luar
			Belum bisa dilaksanakannya Promosi Penanaman Modal baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri
		Belum Optimalnya pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal belum dapat menjangkau sebagian besar pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Manado
Pengendalian Penanaman Modal Belum Terencana dengan baik			
Belum Optimalnya Pendataan Realisasi Penanaman Modal	Kurangnya tingkat Kesadaran Para Pelaku Usaha dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
2	Pelayanan perizinan satu pintu masih perlu ditingkatkan	Masyarakat Belum mengetahui perubahan kebijakan terkait Perizinan Berusaha	Adanya perubahan regulasi terkait perizinan berusaha berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam tujuannya lebih mempermudah Investor dan UMKM namun belum tersosialisasikan dengan baik kepada Masyarakat.
			Adanya Perubahan Regulasi Terkait Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung
		Terjadinya Ekonomi Biaya tinggi saat pengurusan	Masyarakat membutuhkan Jasa Konsultan untuk membuat Dokumen Lingkungan Maupun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Persetujuan Lingkungan dan SLF	Dokumen Teknis untuk SLF yang biaya Konsultannya sangat memberatkan Masyarakat
		Belum Optimalnya Penggunaan Perizinan Online (SIP2T) di masyarakat	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam Penggunaan Sistem Online
		Belum Optimalnya Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat untuk penggunaan Kanal Pengaduan yang ada
			Belum adanya integrasi antara Kanal Pengaduan PD, Kanal Pengaduan Kota Manado dan Kanal Pengaduan Pusat (Lapor.go.id)
		Belum semua SDM di DPMPTSP yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	Kurangnya keikutsertaan ASN di DPMPTSP dalam Pelatihan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Manado tahun 2026 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan Program Prioritas dalam Pembangunan Kota Manado.

Berikut ini adalah tabel review Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Tahun 2026

Tabel 2.4.

REVIEW TEMUAN INSPEKSI AWAL RENCANA KERJA
KOTA MAMADO

Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026			Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Nilai AKIP	A (83)	12,550,000	Nilai AKIP	A (83)	12,550,000	
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	0%	6,863,792,800	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	0%	6,863,792,800	
		Persentase ASN Dinas Penanaman Modal & PTSP yang berkinerja Baik	100%	3,870,939,150	Persentase ASN Dinas Penanaman Modal & PTSP yang berkinerja Baik	100%	3,870,939,150	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	5	12,550,000	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	5	12,550,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	2	6,100,000	Jumlah dokumen perencanaan	2	6,100,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	3	6,450,000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	3	6,450,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	6,834,752,800	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	6,834,752,800	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah waktu penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	6,708,032,800	Jumlah waktu penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	6,708,032,800	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Waktu Honor Penatausahaan Keuangan dan Pengelola Administrasi Keuangan	12 Bulan	126,720,000	Jumlah Waktu Honor Penatausahaan Keuangan dan Pengelola Administrasi Keuangan	12 Bulan	126,720,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Barang dan Aset Perangkat Daerah	100%	29,040,000	Persentase Penyelesaian Administrasi Barang dan Aset Perangkat Daerah	100%	29,040,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Waktu Honor Penatausahaan dan Pengelola Barang dan Aset	12 Bulan	29,040,000	Jumlah Waktu Honor Penatausahaan dan Pengelola Barang dan Aset	12 Bulan	29,040,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Kompetensi di Bidang Penanaman modal/Perizinan	95%	385,000,000	Persentase SDM Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Kompetensi di Bidang Penanaman modal/Perizinan	95%	385,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Pasang/Orang	60,000,000	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Pasang/Orang	60,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi dan Inhouse Training Pelayanan Publik	85 ok	275,000,000	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi dan Inhouse Training Pelayanan Publik	85 ok	275,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 orang	50,000,000	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 orang	50,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Penunjang Kegiatan Kantor	100%	766,202,400	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Penunjang Kegiatan Kantor	100%	766,202,400	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	259,200,000	Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	259,200,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	155,520,000	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	155,520,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	12 Bulan	15,552,000	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	12 Bulan	15,552,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	335,930,400	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	335,930,400	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0%	1,090,000,000	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0%	1,090,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin	10 se	190,000,000	Tersedianya Peralatan dan Mesin	10 se	190,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Jasa Penunjang Kegiatan	100%	1,157,631,000	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Jasa Penunjang Kegiatan	100%	1,157,631,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	635,749,000	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	635,749,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	513,382,000	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	513,382,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Jasa Penunjang Kegiatan	100%	472,105,750	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Operasional Jasa Penunjang Kegiatan	100%	472,105,750	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	237,920,000	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	237,920,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	84,185,750	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	84,185,750	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah waktu pemeliharaan/ rehabilitasi pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	100,000,000	Jumlah waktu pemeliharaan/ rehabilitasi pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	100,000,000	

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai Komitmen Penanaman Modal Non UMK (Rp Miliar)	2,212.30	500,000,000
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Investasi yang siap dipromosikan (Investmen Project Ready to Offer /IPRO)	2	200,000,000
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Perda	1	200,000,000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Penanaman Modal yang tersedia per Kecamatan	0	300,000,000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RUPM	1	150,000,000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen IPRO dan Pengembangan Peta Potensi	1	150,000,000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Peningkatan jumlah Kerjasama Penanaman Modal /MOU	2 MOU	555,000,000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Minat Investasi	6	555,000,000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah laporan strategi promosi penanaman modal	1	105,000,000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah event pameran yang diikuti (lokal/regional, nasional dan internasional)	6	450,000,000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		IKM pelayanan perizinan penanaman modal	3.5	883,609,000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentasi Izin yang diproses Sesuai Standar	98%	883,609,000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Uptime Server Sistem Perizinan Online (SIP2T)	98%	584,609,000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Presentasi Pemenuhan Komitmen Perizinan	98%	119,000,000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Kanal / Pengaduan	6	125,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Rapat Koordinasi	4	55,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase pelayanan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	99%	415,000,000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)	5	415,000,000
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	75,000,000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko	150	185,000,000
Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	350	155,000,000
				13,100,890,950

Nilai Komitmen Penanaman Modal Non UMK (Rp Miliar)	2,212.30	500,000,000
Jumlah Investasi yang siap dipromosikan (Investmen Project Ready to Offer /IPRO)	2	200,000,000
Jumlah Dokumen Perda	1	200,000,000
Jumlah Peta Penanaman Modal yang tersedia per Kecamatan	0	300,000,000
Jumlah Dokumen RUPM	1	150,000,000
Dokumen IPRO dan Pengembangan Peta Potensi	1	150,000,000
Peningkatan jumlah Kerjasama Penanaman Modal /MOU	2 MOU	555,000,000
Jumlah Minat Investasi	6	555,000,000
Jumlah laporan strategi promosi penanaman modal	1	105,000,000
Jumlah event pameran yang diikuti (lokal/regional, nasional dan internasional)	6	450,000,000
IKM pelayanan perizinan penanaman modal	3.5	883,609,000
Presentasi Izin yang diproses Sesuai Standar	98%	883,609,000
Uptime Server Sistem Perizinan Online (SIP2T)	98%	584,609,000
Presentasi Pemenuhan Komitmen Perizinan	98%	119,000,000
Jumlah Kanal / Pengaduan	6	125,000,000
Jumlah Rapat Koordinasi	4	55,000,000
Persentase pelayanan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	99%	415,000,000
Jumlah penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)	5	415,000,000
Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	10	75,000,000
Jumlah Peserta Yang Diberikan Pembinaan	150	185,000,000
Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	350	155,000,000
		13,100,890,950

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti:

- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Inpres No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Visi dan Misi

- Pernyataaan VISI

**MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI BERANDA
SULAWESI UTARA DAN INDONESIA KE ASIA PASIFIK**

2. Pernyataan M I S I

Terkait dengan Misi ini maka DPMPTSP mengemban tugas untuk Membantu Walikota dalam meningkatkan Pertubuhan Ekonomi di Kota Manado melalui Peningkatan Investasi. Oleh karena itu DPMPTSP perlu untuk membuat Perencanaan Pengembangan Iklim Investasi

yang bertumpu pada Sektor Industri Jasa, Perdagangan dan Pariwisata. Selain hal tersebut agar arah kebijakan Investasi dapat selaras dengan Misi yang telah ditetapkan maka perlu adanya penajaman arah Investasi dengan memberikan Insentif Penanaman Modal pada sektor-sektor yang menjadi tumpuan pada Misi ini namun tidak juga meninggalkan Pelayanan untuk kemudahan Investasi di sektor-sektor potensial lainnya.

b. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi Kota Manado 5 (lima) tahun ke depan untuk periode 2025-2029 maka Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Misi 2 : “Penguatan Ekonomi Kota yang Bertumpu Kepada Industri Jasa, Perdagangan dan Pariwisata” yaitu sebagai berikut :

Tujuan : **“Terwujudnya Peningkatan Realisasi Penanaman Modal serta Peningkatan kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu”**

Indikator Tujuan :

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota

Sasaran :

1. Meningkatnya Realisasi investasi

Indikator Sasaran :

Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan PTSP

Indikator Sasaran :

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2026 oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat Pada Matriks Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dibawah ini :

Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	SUMBER DANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP	A (83)	12,550,000	
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	0%	6,863,792,800	
		Persentase ASN Dinas Penanaman Modal & PTSP yang berkinerja Baik	100%	3,870,939,150	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	5	12,550,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	2	6,100,000	PAD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	3	6,450,000	PAD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	6,834,752,800	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah waktu penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	6,708,032,800	DAU + PAD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Waktu Honor Penatausahaan Keuangan dan Pengelola Administrasi Keuangan	12 Bulan	126,720,000	PAD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Barang dan Aset Perangkat Daerah	100%	29,040,000	PAD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Waktu Honor Penatausahaan dan Pengelola Barang dan Aset	12 Bulan	29,040,000	PAD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Kompetensi di Bidang Pemananan modal/Perizinan	95%	385,000,000	PAD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Pasang/Orang	60,000,000	PAD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi dan Inhouse Training Pelayanan Publik	85 ck	275,000,000	PAD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	5 orang	50,000,000	PAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Penunjang Kegiatan Kantor	100%	766,202,400	PAD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	259,200,000	PAD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	155,520,000	PAD
					PAD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	12 Bulan	15,552,000	PAD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	335,930,400	PAD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0%	1,090,000,000	PAD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin	10 se	190,000,000	PAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Jasa Penunjang Kegiatan	100%	1,157,631,000	PAD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	635,749,000	PAD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	513,382,000	PAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Jasa Penunjang Kegiatan	100%	472,105,750	PAD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	237,920,000	PAD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	84,185,750	PAD
Pemeliharaan/Rehabilitasi/Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah waktu pemeliharaan/ rehabilitasi pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	100,000,000	PAD

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai Komitmen Penanaman Modal Non UMK (Rp Miliar)	2,212.30	500,000,000	PAD
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Investasi yang siap dipromosikan (Investmen Project Ready to Offer /IPRO)	2	200,000,000	PAD
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Perda	1	200,000,000	PAD
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Penanaman Modal yang tersedia per Kecamatan	0	300,000,000	PAD
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RUPM	1	150,000,000	PAD
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Dokumen IPRO dan Pengembangan Peta Potensi	1	150,000,000	PAD
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal /MOU	2 MOU	555,000,000	PAD
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Minat Investasi	6	555,000,000	PAD
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah laporan strategi promosi penanaman modal	1	105,000,000	PAD
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah event pameran yang diikuti (lokal, regional, nasional dan internasional)	6	450,000,000	PAD
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		IKM pelayanan perizinan penanaman modal	3.5	883,609,000	PAD
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentasi Izin yang diproses Sesuai Standar	98%	883,609,000	PAD
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Uptime Server Sistem Perizinan Online (SP2T)	98%	584,609,000	PAD
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Presentasi Pemenuhan Komitmen Perizinan	98%	119,000,000	PAD
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Kanal / Pengaduan	6	125,000,000	PAD
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Rapat Koordinasi	4	55,000,000	PAD
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase pelayanan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	99%	415,000,000	PAD
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)	5	415,000,000	PAD
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	75,000,000	PAD
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis / sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko	150	185,000,000	PAD
Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	350	155,000,000	PAD
				13,100,890,950	

BAB V
P E N U T U P

Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Tahun 2026 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2026, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kinerja ini dibuat dengan harapan dapat memberikan kontribusi masukan (input) terhadap proses penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2026.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MANADO**



JIMMY C.E. ROTINSULU, SE. MS.i
NIP. 19731218 200012 1 001
